

## **RAPP Langgar Komitmen Persetujuan Tanpa Paksaan (FPIC)**

**Teluk Meranti, 21 Agustus 2010** - Sebanyak 429 warga dan tokoh masyarakat Teluk Meranti mengirim surat penolakan kepada PT RAPP atas kesepakatan Tanaman Kehidupan yang dibuat antara perusahaan bubur kertas tersebut dengan Tim 40 karena merugikan dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah penentuan sikap dan ini telah melanggar komitmen persetujuan tanpa paksaan atau prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC).<sup>1</sup>

Surat sebanyak 16 lembar tersebut ditujukan kepada Direktur PT RAPP di Pangkalan Kerinci dan dikirim pada hari Jumat kemarin. Dalam surat tersebut juga terdapat delapan anggota Tim 40 yang tidak ikut menandatangani surat kesepakatan dengan PT RAPP dan menyatakan penolakan atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan antara Tim 40 dan PT RAPP sendiri dilakukan pada akhir Juli 2010 lalu.

Jasri Abas, anggota Tim 40 yang menolak kesepakatan dengan perusahaan mengatakan, Tim 40 sebagai perwakilan masyarakat tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat. Sebagaimana surat keputusan Camat Teluk Meranti Nomor 140/PEM/2009/03 tentang pembentukan Tim 40, keputusan yang diambil seharusnya merupakan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan masyarakat.

“Kesepakatan dengan RAPP itu tidak disetujui semua anggota Tim 40. Ini artinya masih ada pro-kontra di tengah masyarakat. Apalagi dalam surat penolakan atas kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh 429 orang lebih warga dan tokoh masyarakat Teluk Meranti,” kata Jasri.

Selain itu, alasan penolakan sejumlah anggota Tim 40 dan masyarakat tersebut adalah butir kesepakatan yang merugikan masyarakat yakni pengelolaan tanaman kehidupan melalui koperasi. “Hal ini akan merugikan masyarakat, karena lahan tersebut tidak bisa dimiliki oleh masyarakat secara individu karena status lahan itu tidak dibebaskan dari areal konsesi perusahaan. Ini akan menjadi pemicu masalah di kemudian hari,” kata Deli Saputra, ketua Forum Masyarakat Penyelamat Semenanjung Kampar (FMPSK).

Sekretaris Jendral Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Jhony Setiawan Mundung, mengatakan, adanya surat penolakan masyarakat terhadap kesepakatan yang dibuat membuktikan bahwa PT RAPP sudah melanggar prinsip FPIC (*Free Prior Informed and Consent*) atau persetujuan tanpa paksaan yang sudah diadopsi oleh PT RAPP. FPIC merupakan prinsip pembangunan yang diatur dalam deklarasi PBB di mana Indonesia ikut bertandatangan, dan RAPP telah berkomitmen untuk menerapkannya, tapi dalam kasus Semenanjung Kampar RAPP mengingkarnya.

“Masyarakat masih belum menerima sepenuhnya atas negosiasi yang disusun oleh PT RAPP dan ini jelas perusahaan grup APRIL ini tidak bisa memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh departemen kehutanan dan karenanya perusahaan tidak dibenarkan beraktifitas di hutan Semenanjung Kampar,” kata Mundung.

Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan mengatakan perlindungan hutan gambut Semenanjung Kampar harus menjadi prioritas dan pemanfaatannya harus melibatkan masyarakat

secara menyeluruh. Presiden SBY sendiri sudah berkomitmen untuk menerapkan moratorium di lahan gambut dan itu harus dimulai dari hutan gambut kaya karbon Semenanjung Kampar, Riau.

“Penerapan moratorium pembukaan hutan gambut bukan hanya melindungi hutan dan iklim tetapi juga menjamin kehidupan masyarakat di sekitar kawasan. Dan program pemerintah dari komitmen emisi harus memprioritaskan masyarakat daripada perusahaan yang justru telah melepaskan emisi dan menghancurkan masa depan masyarakat sejak pertama kali beroperasi di Semenanjung Kampar,” tegas Susanto.

**Kontak:**

Jasri Abas, anggota Tim 40 : 085265658893

Deli Saputra, ketua FMPSK : 081270876636

Jhony Setiawan Mundung, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau : 08117517525

Susanto Kurniawan, Koordinator Jikalahari / TP2SK : 08127631775

**Catatan Editor :**

1. Deklarasi PBB yang mengatur FPIC silakan buka :

<http://scaleup.or.id/pengalamanfpicredd/Dekalari%20PBB%20%20ttg%20Hak2%20Masyarakat%20Adat%20new.pdf>

2. Informasi detail tentang FPIC silakan buka :

<http://scaleup.or.id/Letters%20April/Handbook%20FPIC%20final.pdf>